

ANALISIS HAMBATAN EKSPOR PRODUK KERAJINAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Matahari Farransahat

Institute of Public Policy and Economic Studies

xaisinkiyut@yahoo.com

Ahmad Ma'ruf

Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

macrov_jogja@yahoo.com

Abstract

The research was aimed to find out factors and variables on technical, administrative and regulation which are barriers on handicraft exports in Daerah Istimewa Yogyakarta in 2005 based on the exporter perception about the barrier on handicraft exports. By using first hand data or primary data and analyze with the AHP (Analitical hierarchy Process) method.

In the research concludes that the factors, according to exporters preception, the regulations on labeling and product standard is the main barrier that influence exporting process on handicrafts in DIY. Following it, is the technical and administrative problem as the second barrier influencing the handicraft exports. The third barrier is other regulations that involves the export process of handicraft. It also concludes that the variables which become barriers to handicraft export in DIY according to exporter preception is first of all, health and envoirment conservation, second is packaging procedur, third is valuing merchandise in customs office. Beside the variables mentioned there are seven other barrier variables follows and all of those variables concluded also involves in each barrier factors mention earlier.

In spite of the factors and variables of handicraft export mentioned, there are still occur classical problems in the DIY handicraft industry such as the need of capital and soft loan, marketing the product, raw material supply, workers, buyers behavior, and also on illegal tax that tends to high cost economy.

Keywords: *Export, Analitical Hierarchy Process, World Trade Organization*

I. PENDAHULUAN

Perdagangan Internasional muncul karena adanya keunggulan komparatif yang berbeda pada tiap-tiap negara dalam menyediakan barang-barang tertentu. Perdagangan ini memungkinkan negara-negara mengkonsumsi beberapa barang dan jasa yang lebih murah melalui impor dan mengekspor bermacam barang yang memiliki berbagai keunggulan dari negara lainnya, yang pada akhirnya perdagangan ini dapat meningkatkan efisiensi dalam memproduksi dengan cara mendorong pengalokasian dari sumber daya yang ada (Christopher & lowes, 1994)

Ekspor merupakan hal yang penting dalam perdagangan internasional, karena ekspor bersama dengan impor menghasilkan neraca pembayaran pada suatu negara (negara harus mengekspor untuk dapat membiayai impornya yang dibayar dengan mata uang asing) dan ekspor dapat menggambarkan tambahan dana dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional, yang memberikan peningkatan pendapatan dan output riil.

Dalam konteks perekonomian global Indonesia merupakan negara kecil yang tidak mempunyai peran langsung dalam perekonomian dunia, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa Indonesia tidak mempunyai peran dalam kancah perekonomian dunia karena pada ekspor bidang tertentu Indonesia mempunyai andil yang cukup besar terlebih dengan negara-negara yang sekelas khususnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Suatu negara kecil masih dapat memper-

juangkan kepentingannya secara optimal, yaitu dengan beraliansi dengan negara lainnya yang mempunyai kepentingan yang sama (Boediono, 2001).

Pada waktu terjadinya krisis perekonomian (1997), berbagai sendi perekonomian bangsa Indonesia melemah. Hal tersebut berimbas pada nilai ekspor yang semakin menurun, tetapi penurunan nilai ekspor tersebut tidak terjadi pada sektor kerajinan. Nilai ekspor kerajinan yang tercerminkan dari komoditas ekspor barang karya seni, barang antik dan koleksi (*Antiques and works of art*) malah menjadi naik tajam pada tahun 1997 dan 1998. Secara teori hal tersebut terjadi karena penurunan nilai mata uang rupiah dibandingkan dollar AS yang menjadikan ekspor naik, khususnya dari komoditi yang berbahan baku dari dalam negeri. Industri kerajinan di Indonesia umumnya termasuk di dalam golongan Industri rumah tangga (UMKM) yang menjadi 'bumper' penyelamat krisis.

Industri kerajinan di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu produk unggulan dari komoditas utama ekspor daerah. Pada tabel di atas terlihat industri kerajinan mempunyai nilai ekspor yang tinggi dibandingkan dengan produk-produk unggulan ekspor yang lain. Hal tersebut sangat berarti bagi perekonomian Propinsi DIY mengingat hampir seluruhnya dihasilkan oleh pelaku UKM yang berbahan baku lokal, berorientasi ekspor dan berdampak luas bagi pengembangan sektor lainnya (Gatot Irawan, 2003).

Tabel 1.

Nilai Ekspor Barang-Barang Non-Migas Utama DIY, (Ribu dollar AS)

Barang Dagangan	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Pakaian Jadi	488	14.989	23.904	24.546	14.057	395
Tekstil	389	9.88	8.177	5.47	6.199	522
Kerajinan	349	4.088	6.24	6.233	10.011	559
Alat Listrik	761	4.324	8.343	8.571	4.792	4
Besi Baja	35	216	309	214	347	28
Bahan Makanan	1.795	2.883	3.139	2.545	2.29	27
Teh	-	68	235	504	886	45
Kayu Lapis	44	7.177	213	22	14	-
Kaca	3	531	104	170	388	15
Tuna Cakalang	21	445	736	215	524	12

Sumber: Bank Indonesia

II. RUMUSAN MASALAH

Ada beberapa penyebab terjadinya penurunan nilai ekspor Indonesia. Berbagai peraturan yang diterapkan negara pengimpor dimungkinkan menjadi alasan utama, seperti tidak adanya instansi pemberi label standar mutu, terutama dalam hal keamanan lingkungan dan sosial. Adanya berbagai perijinan maupun peraturan baru menjadi hambatan dan kendala yang berpengaruh terhadap ekspor kerajinan Indonesia, dalam hal ini persoalan yang penting bukan lagi pada hambatan tarif melainkan juga pada hambatan non tarif. Hal tersebut juga berdampak bagi nilai ekspor industri kerajinan yang bersal dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Salvatore (1997) kelancaran hubungan perdagangan antar negara juga dapat terhambat maupun dipersulit oleh berbagai proteksionisme baru, seperti berbagai peraturan teknis, standar kesehatan yang kelewat kaku, prosedur

administratif yang terkadang mengada-ada, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berperan sebagai pengganti tarif. Pergeseran tersebut menurut Muhammed Ariff dan Hal Hill dikarenakan tarif terlalu mudah untuk dilihat, dan tarif yang dikenakan pada banyak jenis barang menurun karena adanya perundingan-perundingan GATT, sebaliknya berbagai proteksionisme baru tidak perlu dirundingkan secara multilateral dan tidak diatur oleh GATT.

Berdasar latar belakang permasalahan mengenai proteksionisme ekspor tersebut maka penelitian ini mencoba untuk melakukan pemeringkatan kendala teknis, administratif dan bermacam peraturan lainnya yang menghambat ekspor kerajinan berdasarkan persepsi pelaku usaha di DIY tahun 2005. Faktor dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori aneka standar dan ketentuan teknis, administratif, dan berbagai macam peraturan lainnya

yang menghambat perdagangan (ekspor) pada hambatan non tarif yang mengacu dari teori perdagangan internasional dan keadaan riil yang dipermasalahkan oleh WTO (*World Trade Organization*). Oleh karena itu, dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah peringkat dari kendala teknis, administratif dan bermacam peraturan lainnya yang menghambat ekspor kerajinan berdasarkan persepsi pelaku usaha di DIY tahun 2005. 2) Bagaimanakah persepsi pelaku usaha industri kerajinan terhadap kendala yang menghambat ekspor di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005.

III. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bobot faktor dan variabel yang menjadi kendala teknis, administratif dan bermacam peraturan lainnya yang menghambat ekspor kerajinan di DIY.

Penelitian ini diharapkan berguna: 1) Bagi pelaku usaha industri kerajinan baik pengrajin maupun eksportir, dapat mengetahui mengenai kendala yang menghambat ekspor industri kerajinan. 2) Bagi pemerintah, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan, khususnya kebijakan yang terkait dengan ekspor komoditas kerajinan.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

Perdagangan atau pertukaran mempunyai arti khusus dalam ilmu ekonomi, perdagangan diartikan sebagai

proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak, dimana masing-masing pihak tersebut harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung-rugi pertukaran tersebut dari sudut kepentingan masing-masing, dan kemudian menentukan apakah ia bersedia melakukan pertukaran atau tidak. Oleh karena itu perdagangan hanya akan terjadi apabila paling tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan, ini berarti bahwa perdagangan bila terjadi adalah sesuatu yang selalu baik (Boediono, 2001).

Perdagangan antar negara lebih rumit jika dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri, karena hubungan perdagangan internasional melintasi batas-batas negara dan berhubungan dengan bangsa dan pemerintahan lain. Kompleks dan rumitnya perdagangan internasional disebabkan politik ekonomi, mata uang, sistem tata niaga, peraturan perpajakan atau bea cukai sendiri, sistem ukuran dan standar mutu yang berbeda (Gilarso, 1992).

Menurut Jhinghan (1992) terdapat dua jenis manfaat yang bisa diperoleh dari perdagangan internasional, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung perdagangan internasional yaitu adanya perluasan pasar, menumbuhkan rangsangan investasi, serta terjadinya peningkatan pendapatan dan tabungan pemerintah. Sedangkan manfaat tidak langsung adalah terjadinya berbagai penemuan dan pembaharuan,

peningkatan produktivitas tenaga kerja serta penurunan biaya.

Manfaat pokok dari perdagangan internasional adalah diperolehnya barang yang harganya relatif murah dan kemungkinan dapat menjual ke luar negeri dengan harga yang relatif mahal. Pada dasarnya perdagangan internasional timbul dari adanya perbedaan dalam harga (faktor penawaran) serta pendapatan dan selera (faktor permintaan) (Budiarto dan Ciptono, 1997).

Bentuk hambatan yang merupakan metode yang berbeda dari tarif adalah hambatan non tarif, hambatan seperti ini mempunyai ancaman terhadap arus perdagangan internasional yang lebih membahayakan dan sesungguhnya hanya dimaksudkan untuk menghalangi masuknya barang impor ke suatu negara, hambatan tersebut antara lain adalah pembatasan ekspor secara "sukarela", aturan-aturan teknis, prosedur administratif, dan berbagai ketentuan lainnya. Hambatan perdagangan juga dapat di munculkan oleh adanya kartel-kartel internasional dan dari praktek dumping serta subsidi ekspor (Salvatore, 1997).

Hambatan non tarif tidak selalu tampak, tetapi pengaruhnya cukup besar dan sangat mempengaruhi perdagangan internasional. Pengaruh hambatan non tarif menurut Hendra Halwani dan Prijono Tjiptoherijanto (1993), antara lain: 1) Jadwal tiba barang menjadi tertunda, baik di gudang maupun di tempat lain. Keterlambatan arus barang mengakibatkan tambahan biaya yang akan dibebankan kepada konsumen yang berarti kenaikan harga

barang. Harga yang tinggi mempengaruhi juga harga barang yang tidak diimpor. 2) Keterlambatan arus barang juga memperburuk hubungan eksportir dan importir. 3) Hambatan non tarif memperburuk citra di kalangan eksportir sebagai suatu negara yang aparatnya tidak efisien. 3) Hambatan non tarif dapat menimbulkan balas dendam negara lain, jika negara lain menghilangkan kuota dan kebijaksanaan protektionistik, dengan mengurangi pajak impor atau membuka pasar seluas-luasnya, sehingga kedua negara berbuat sama.

Aneka standar dan ketentuan teknis, administratif, dan berbagai macam peraturan lainnya jelas dapat mempersulit hubungan perdagangan antar negara, menurut teori perdagangan internasional dan keadaan riil yang dipermasalahkan oleh WTO (*World Trade Organization*). Berbagai permasalahan tersebut adalah:

- A. Berbagai macam peraturan yang ditetapkan oleh negara importir yang berupa peraturan pelabelan dan standarisasi yang terlalu mengikat, seperti: a) Persyaratan penggunaan barang lokal (*Local Content Requirement*), b) Ketentuan asal barang (*Rules of Origin*), c) Standar mutu kualitas, dan d) Standar keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.
- B. Berbagai ketentuan teknis dan administratif dari kebijakan negara importir yang bersifat diskriminatif dalam aturan domestiknya, dengan tidak mempublikasikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, petugas pabean yang sangat agresif dengan sengaja menghambat pemasukan barang dan tidak menunjukkan keinginan bekerjasama (*uncooperative*).

C. Berbagai peraturan lain yang dibuat oleh negara importir dan kebijakan negara-negara lain yang dapat menghambat perdagangan, antara lain: a) Pajak - pajak perbatasan (*border taxes*), b) Perjanjian-perjanjian komoditi internasional, yang merupakan wahana bagi negara-negara yang mempunyai kepentingan sama dengan menciptakan mekanisme dukungan kolektif. c) Perijinan konsuler (*consular formalities*), merupakan hambatan yang mengharuskan adanya surat dari konsuler.

V. METODE PENELITIAN

A. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pelaku usaha yaitu eksportir industri kerajinan di DIY yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan dipandu kuesioner untuk melihat persepsi pelaku.

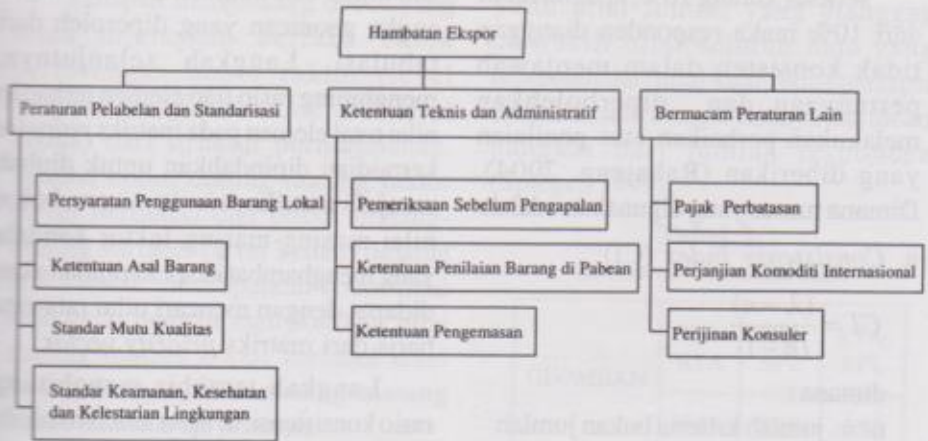
Penentuan Sampel dilakukan secara acak (*random*) terhadap pelaku usaha dengan didasarkan pada pertimbangan penelitian alat analisis AHP yang menuntut pemahaman, pengetahuan, responden terhadap permasalahan. Oleh karena itu responden yang diambil secara acak tersebut harus memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan

pemahaman mengenai permasalahan hambatan ekspor produk industri kerajinan di DIY. Hal tersebut sangatlah penting karena penelitian dengan model AHP tidak mengutamakan kuantitas responden melainkan kualitas responden sehingga data yang diperoleh mempunyai nilai objektifitas yang tinggi.

B. Alat Analisis

Penghitungan bobot faktor dan variabel yang menghambat ekspor kerajinan menggunakan metode AHP (*The Analytical Hierarchy Process*). AHP merupakan model pengambilan keputusan dengan peralatan utama yaitu sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya adalah persepsi manusia, sehingga diharapkan dapat menggambarkan kondisi yang senyatanya.

Menurut Bambang Permadi, (1992) AHP adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya yang umumnya memakai input yang kuantitatif atau data sekunder sehingga otomatis model-model sebelumnya tersebut hanya dapat mengolah hal-hal kuantitatif pula. Kelebihan lain model AHP terletak pada kemampuannya memecahkan masalah yang '*multiobjectives*' dan '*multicriterias*' ini disebabkan oleh fleksibilitasnya yang tinggi terutama dalam pembuatan hirarkinya yang membuat model AHP dapat menangkap beberapa tujuan dan beberapa kriteria sekaligus dalam sebuah model.



Gambar 1.
Struktur Hierarki Permasalahan

Faktor peraturan dan standarisasi dijabarkan dengan variabel persyaratan penggunaan barang lokal, ketentuan asal barang, standar mutu kualitas dan standar keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Faktor ketentuan teknis dan administratif dijabarkan dengan variabel pemeriksaan sebelum pengapalan, ketentuan penilaian barang di pabean dan ketentuan pengemasan. Faktor bermacam peraturan lainnya dijabarkan dengan variabel pajak perbatasan, perjanjian komoditi internasional dan perijinan konsuler. Faktor dan variabel tersebut disusun ke dalam pohon permasalahan secara hirarki seperti yang terlihat pada gambar 1. Hasil yang akan didapatkan dari pembobotan variabel-variabel dengan metode AHP akan menunjukkan peringkat faktor mana yang paling berpengaruh terhadap kendala ekspor kerajinan yang ada di DIY menurut persepsi pelaku usaha.

Aksioma dasar yang harus diperhatikan agar dapat menggunakan dan memahami metode AHP, menurut Bambang Permadi, (1992) antara lain: 1) *Reciprocal Comparison*, 2) *Homogeneity*, 3) *Independence*, dan 4) *Expectation*. Sementara itu, prinsip Dasar AHP menurut Saaty adalah 1) *Problem Decomposition*, 2) *Comparative Analysis*, 3) *Synthesis of Priority*.

Konsistensi dalam hal ini diartikan intensitas hubungan antar elemen yang didasarkan pada kriteria tertentu, saling membenarkan secara logis. Pengujian konsistensi dilakukan sebagai cara untuk melihat konsistensi jawaban penilaian pasangan perbandingan maupun struktur hierarki permasalahan. Hal tersebut dikarenakan pada kenyataan menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin untuk memperoleh jawaban partisipan yang absolut konsisten (Much. Junaidi 2002). AHP mentoleransi tingkat konsistensi

sebesar kurang 10%, apabila lebih dari 10% maka responden dianggap tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan dan diperbolehkan melakukan perbaikan atas penilaian yang diberikan (Rahajeng, 2004). Dimana rumus yang digunakan adalah:

a. *Consistency Index* (CI)

$$CI = \frac{(\lambda - n)}{(n - 1)}$$

dimana :

n = jumlah kriteria bukan jumlah responden

̄ = rata-rata dari konsistensi vektor

b. *Consistency Ratio* (CR)

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

dimana : RI = Random Indeks

C. *Metode Pengolahan Data*

Permulaan pengolahan data dilakukan dengan menabulasikan hasil wawancara penelitian dalam bentuk tabel untuk kemudian dihitung nilai geomeannya (*geometric mean*), yaitu nilai sentral yang dianggap mewakili nilai seluruh data yang diperoleh dari nilai kualifikasi persepsi dikalikan satu dengan lainnya dan dicari pangkat dari jumlah responden (Spiegel, 1999).

Rumus Geometric Mean :

$$\sqrt[n]{X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \dots X_n}$$

Langkah berikutnya membentuk *matrix pairwise comparison* yang membandingkan antara faktor berbagai kendala yang menghambat ekspor kerajinan dengan menggunakan prinsip

kebalikan dan kemudian diisi dengan angka geomean yang diperoleh dari tabulasi. Langkah selanjutnya, menghitung rasio tiap elemen terhadap nilai total elemen pada matriks *pairwise* kemudian dipindahkan untuk diubah menjadi matriks *priority vector*, bobot nilai masing-masing faktor kendala yang menghambat ekspor kerajinan akan didapat dengan mencari nilai rata-rata baris dari matriks *priority vector*.

Langkah terakhir menghitung rasio konsistensi, dengan terlebih dahulu menghitung *weighted sum vector* yang diperoleh dari penjumlahan antara perkalian nilai rata-rata pada matriks *priority vector* dengan nilai elemen dalam matriks *pairwise comparison*. Hasil dari *weighted sum vector* dibagi dengan nilai rata-rata baris pada matriks *priority vector* akan diperoleh nilai konsistensi vektor

Kemudian dilanjutkan dengan mencari lamda yang diperoleh dari rata-rata konsistensi vektor. Setelah mendapatkan lamda dilanjutkan dengan menghitung nilai indeks konsistensi yang diperoleh dari rumus berikut:

$$CI = \frac{(\lambda - n)}{(n - 1)}$$

dimana :

n = jumlah kriteria bukan jumlah responden

̄ = rata-rata dari konsistensi vektor

Untuk mendapatkan konsistensi rasio digunakan rumus :

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

dimana : RI = Random Indeks

Tahapan menghitung bobot yang telah dijelaskan berlaku untuk perhitungan bobot faktor (level pertama) maupun bobot variabel (level kedua) dari struktur permasalahan. Setelah bobot masing-masing faktor (level pertama) dan bobot masing-masing variabel (level kedua) didapat maka untuk mendapatkan bobot final dilakukan dengan mengkalikan nilai masing-masing bobot variabel level kedua dengan nilai masing-masing bobot faktor level pertama

VI. HASIL ANALISIS

Ada sebanyak 36 calon responden pengusaha yang telah direncanakan untuk diwawancarai dengan 20 responden yang ditargetkan, hanya 9 pengusaha yang berhasil dijadikan responden. Hal tersebut dikarenakan pengusaha calon responden selain tidak berkenan ada yang dirasa tidak memenuhi syarat untuk dijadikan responden model penelitian AHP, mengingat pada model penelitian ini tidak mementingkan banyaknya responden melainkan kualitas dari pemahaman akan bidang permasalahan yang diteliti, dan 9 responden tersebut telah memenuhi persyaratan penelitian model AHP.

A. Bobot Faktor Penghambat Ekspor Kerajinan di DIY

Sesuai dengan tahapan penelitian, setelah melakukan tabulasi hasil wawancara dilanjutkan dengan mencari nilai *geomean* untuk level pertama, hasil nilai tersebut seperti terlihat pada tabel 2. *Geomean* (*geometric mean*),

yaitu nilai sentral yang dianggap mewakili nilai seluruh data yang diperoleh dari nilai kualifikasi persepsi dikalikan satu dengan lainnya dan dicari pangkat dari jumlah responden (Spiegel, 1999).

Tabel 2.
Geomean Tabulasi data

GEOMEAN	PPS-KTA	PPS-BPL	KTA-BPL
	0,83	1,48	0,85

Sumber: Diolah dari Data Primer

Catatan: PPS = Peraturan Pelabelan dan Standarisasi, KTA = Ketentuan Teknis dan Administratif, BPL = Berbagai Peraturan Lain

Angka sebesar 0,83 untuk PPS-KTA menunjukkan bahwa nilai *geomean* untuk Peraturan Pelabelan dan Standarisasi terhadap Ketentuan Teknis dan Administratif adalah senilai 0,83. Nilai *geomean* pada Peraturan Pelabelan dan Standarisasi terhadap Berbagai Peraturan Lain adalah sebesar 1,48. Langkah selanjutnya adalah memindahkan nilai *geomean* ke dalam matriks pairwise seperti yang terlihat pada tabel 3.

Tabel 3.
Matriks Pairwise

Tujuan	PPS	KTA	BPL
PPS	1,00	0,83	1,48
KTA	1,21	1,00	0,85
BPL	0,67	1,17	1,00
Jumlah	2,88	3,00	3,34

Sumber: Diolah dari Data Primer

Catatan: PPS = Peraturan Pelabelan dan Standarisasi, KTA = Ketentuan Teknis dan Administratif, BPL = Berbagai Peraturan Lain

Matriks ini menunjukkan tingkat kepentingan setiap faktor/variabel terhadap faktor/variabel yang lainnya. Misalnya angka 0,83 menunjukkan bahwa responden lebih menganggap faktor Peraturan Pelabelan dan Standarisasi lebih menghambat ekspor kerajinan di DIY daripada faktor Ketentuan Teknis dan Administratif sebesar 0,83. Aksioma *reciprocal comparison* menjadikan nilai matrik antara faktor Ketentuan Teknis dan Administratif dibandingkan Peraturan Pelabelan dan Standarisasi adalah sebesar 1/0,83 yaitu 1,21.

Kemudian dilanjutkan dengan menghitung matrik *priority vector*. Nilai tiap elemen menunjukkan prioritas preferensi responden terhadap elemen yang lain. Selanjutnya diteruskan dengan mencari nilai rata-rata baris dari matrik *priority vector* tersebut yang tidak lain merupakan bobot nilai dari tiap faktor.

Tabel 4.
Matriks Priority Vector

Tujuan	PPS	KTA	BPL	Jumlah
PPS	0,35	0,42	0,23	1,00
KTA	0,28	0,33	0,39	1,00
BPL	0,44	0,26	0,30	1,00
Rata-rata	0,36	0,34	0,31	1,00
Bobot				

Sumber: Diolah dari Data Primer

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada level pertama faktor Peraturan Pelabelan dan Standarisasi menjadi hal yang paling besar pengaruhnya dalam menghambat ekspor kerajinan di DIY dengan bobot nilai sebesar 36%, kemudian Faktor Ketentuan Teknis dan Administratif berada pada urutan kedua dengan bobot nilai sebesar 34% dan faktor Ber macam Peraturan Lain pada urutan ketiga dengan bobot nilai sebesar 31%.

Tabel 5.
Bobot Level Pertama

Faktor	Bobot	Rangking
Peraturan Pelabelan dan Standarisasi	0,36	1
Ketentuan Teknis dan Administratif	0,34	2
Ber macam Peraturan Lain	0,31	3

Sumber: Diolah dari Data Primer

Menurut Persepsi pelaku usaha pada faktor-faktor penghambat ekspor kerajinan, sebenarnya hal-hal yang menjadi kendala adalah belum terbiasanya mereka dengan peraturan-peraturan ataupun ketentuan-ketentuan baru yang dikeluarkan oleh negara importir. Oleh karena itu Peraturan

Pelabelan dan Standarisasi serta Ketentuan Teknis dan Administratif bagi mereka merupakan faktor yang sering menjadi hambatan karena dari faktor-faktor ini banyak tercipta berbagai regulasi baru jika dibandingkan dengan faktor Ber macam Peraturan Lain yang jarang

mengeluarkan regulasi baru, sehingga para pelaku usaha tidak merasa berat karena telah terbiasa.

Perhitungan pada level kedua juga dengan menggunakan langkah yang sama seperti pada level pertama. Setelah diketahui bobot nilai level pertama dan bobot nilai level kedua maka langkah selanjutnya adalah mengitung bobot nilai final yang merupakan perkalian antara bobot nilai pada level pertama dengan bobot nilai pada level kedua. Tabel 6 memperlihatkan nilai bobot faktor pada level pertama dan nilai bobot variabel pada level kedua sesuai dengan struktur hierarki permasalahan. Faktor Peraturan Pelabelan dan Standarisasi memiliki empat variabel yaitu Standar Keamanan, Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan dengan bobot sebesar 42%, variabel Standar Mutu Kualitas dengan bobot nilai sebesar 30%, variabel Persyaratan Penggunaan Barang Lokal dengan bobot nilai sebesar 16% dan Variabel Ketentuan Asal Barang dengan bobot nilai sebesar 12%.

Variabel Standar Keamanan, Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan menempati urutan pertama pada faktor Peraturan Pelabelan dan Standarisasi dikarenakan pemerintah negara importir sering mengubah regulasi dalam bidang ini, dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya. Variabel Standar Mutu Kualitas cukup berpengaruh banyak dalam menghambat ekspor kerajinan pada faktor Peraturan Pelabelan dan Standarisasi dikarenakan variabel ini walaupun tidak secara langsung menjadi perhatian dari pemerintah negara importir tetapi menjadi perhatian oleh *pembeli* mancanegara untuk selalu memperhatikan konsistensi kualitasnya. Variabel Persyaratan Penggunaan Barang Lokal dan variabel Ketentuan Asal Barang tidak menjadi hal yang menyulitkan dan berpengaruh lagi dalam menghambat ekspor kerajinan, karena berbagai persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan menggunakan regulasi lama dan telah baku.

Tabel 6.
Bobot Level Pertama dan Kedua

Level Pertama		Level Kedua		Bobot Final
Peraturan Pelabelan dan Standarisasi	0,36	Persyaratan Penggunaan Barang Lokal	0,16	0,06
		Ketentuan Asal Barang	0,12	0,04
		Standar Mutu Kualitas	0,30	0,11
		Standar Keamanan, Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan	0,42	0,15
Ketentuan Teknis dan Administratif	0,34	Pemeriksaan Sebelum Pengapalan	0,26	0,09
		Ketentuan Penilaian Barang di Pabean	0,37	0,12
		Ketentuan Pengemasan	0,37	0,12
Berbagai Peraturan Lain	0,31	Pajak Perbatasan	0,38	0,12
		Perjanjian Komoditi Internasional	0,38	0,12
		Perijinan Konsuler	0,24	0,07
TOTAL				1,00

Sumber: Diolah dari Data Primer

B. Bobot Final

Faktor dan variabel dalam penelitian ini pada akhirnya digabungkan untuk mendapatkan bobot final. Standar Keamanan, Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan menempati urutan pertama dengan bobot nilai terbesar yaitu 14,96%. Menurut pelaku usaha variabel tersebut sangat memberatkan karena regulasi yang diberlakukan oleh negara importir sering berubah dengan ketentuan standar yang berbeda di setiap negara. Selain jelas membutuhkan biaya dan waktu yang lebih dalam mendapatkan standar (ijin) dari berbagai regulasi tersebut, variabel kendala ini juga terkait erat dalam mempengaruhi variabel

penghambat lainnya yang merupakan perluasan dari ketentuan-ketentuan regulasi yang diberlakukan.

Sebagai contoh untuk melakukan ekspor kerajinan ke negara Australia dan negara-negara eropa, dengan diberlakukannya standar baru yang lebih tinggi untuk menghilangkan serangga pada kayu (rayap), maka negara-negara tersebut menginginkan produk kerajinan dalam *container* yang dikirimkan telah mendapatkan sertifikat (label) bebas serangga. Pelabelan atau standar bebas kuman tersebut dapat diperoleh dari perusahaan fumigasi (pembunuh kuman) yang telah ditunjuk dan bersertifikat dari pemerintah negara impotir atau yang telah diakui dengan standar internasional.

Tabel 7.
Bobot Final

Variabel	Bobot Final	Rangking
Standar Keamanan, Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan	0,1496	1
Ketentuan Pengemasan	0,1240	2
Ketentuan Penilaian Barang di Pabean	0,1236	3
Pajak Perbatasan	0,1176	4
Perjanjian Komoditi Internasional	0,1172	5
Standar Mutu Kualitas	0,1073	6
Pemeriksaan Sebelum Pengapalan	0,0875	7
Perijinan Konsuler	0,0733	8
Persyaratan Penggunaan Barang Lokal	0,0567	9
Ketentuan Asal Barang	0,0418	10

Sumber: Diolah dari Data Primer

Peraturan fumigasi tersebut merupakan salah satu contoh dari banyak peraturan standarisasi dari variabel ini yang memberatkan, seperti halnya dengan sertifikat produk kerajinan yang tidak boleh menggunakan bahan baku dari hewan yang dilindungi jika produk tersebut berbahan baku binatang. Contoh lain pada produk yang menggunakan bahan baku kayu, eksportir harus memiliki ijin dalam bentuk sertifikat yang jelas dari pemerintah dan melakukan pengovenan dengan standar kadar air dalam kayu yang tidak boleh melebihi 14%.

Mulai peringkat ketujuh sampai dengan terakhir, pelaku usaha tidak merasakan variabel-variabel hambatan tersebut menjadi kendala yang berarti, hal tersebut dikarenakan mereka telah terbiasa dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Variabel-variabel tersebut secara berurutan antara lain; Pemeriksaan Sebelum Pengapalan pada urutan ketujuh dengan bobot nilai final sebesar 8,75%, variabel Perijinan Konsuler pada urutan kedelapan dengan bobot nilai sebesar 7,33%, diikuti variabel Persyaratan Penggunaan Barang Lokal pada urutan kesembilan dengan bobot nilai final sebesar 5,67% dan pada urutan terakhir ditempati oleh variabel Ketentuan Asal Barang dengan bobot nilai sebesar 4,18%

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang menjadi penghambat ekspor kerajinan di DIY menurut persepsi pelaku usaha menjadi kendala dikarenakan belum terbiasanya para pelaku usaha dengan peraturan-peraturan ataupun ketentuan-ketentuan baru yang ditetapkan oleh negara importir. Kendala utama dalam ekspor produk kerajinan DIY adalah standar keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan, ketentuan pengemasan, dan ketentuan penilaian barang di pabean.

Menurut pelaku usaha permasalahan hambatan non tarif yang berupa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh negara importir bersifat 'uncontrollable', sehingga membutuhkan peran aktif dari pemerintah. Saran untuk kebijakan adalah: a) mengatasi ekonomi biaya tinggi dengan mengenakan tingkat pajak yang bijak dan hasil pajak tersebut juga kembali menjadi kemudahan yang mendukung (konduusif) bagi dunia usaha, sehingga dapat meningkatkan ekspor kerajinan, dan b) diperlukan Intervensi pemerintah baik pada urusan dalam negeri maupun pada percaturan dunia internasional, peran asosiasi terkait dan perbankan yang lebih aktif sehingga dapat mengatasi permasalahan industri kerajinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antriyandari, Ernoiz. 2005. *Analisis Kinerja Ekspor Mebel Kayu Propinsi DIY*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta. Sekolah Pascasarjana UGM
- Ariff, Muhamed dan Hal Hill. 1988. *Industrialisasi di Asean 1988.*, Jakarta: LP3ES
- BI DIY. 2005. *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Maret 2005*, Yogyakarta: BI DIY.
- Boediono. 2001. *Indonesia Menghadapi Ekonomi Global*, Yogyakarta: BPFE.
- Budiarto, Teguh dan Ciptono, Fandi. 1997. *Pemasaran Internasional*. Yogyakarta: BPFE.
- Gilarso, T. 1992. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Yogyakarta: Kanisius
- Halwani, H. dan P. Tjiptoherijanto. 1993. *Perdagangan Internasional Pendekatan Ekonomi Makro dan Mikro*, Jakarta.
- Jhinghan, ML. 1992. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali.
- Junaidi, M. 2002. *Penerapan AHP dalam Penentuan Prioritas Program Penanggulangan Kasus Pencurian Kayu*. Penelitian disajikan dalam simposium AHP II, INSAHP Surabaya, 9 November
- Lindert, Peter H. *Ekonomi Internasional*. Terjemahan oleh Burhanuddin Abdullah. 1990. Jakarta: Erlangga.
- Pass, Christopher & Bryan Lowes. *Kamus Lengkap Ekonomi* edisi kedua. Terjemahan oleh Tumpal Rumapea. 1994. Jakarta: Erlangga.
- Parung, Joniarto. 2002. *Penggunaan AHP dalam Keputusan Pemilihan Lokasi Pabrik untuk Perusahaan World Class MANufacturing*. Penelitian disajikan dalam simposium AHP II, INSAHP Surabaya, 9 November
- Permadi, B. 1992. *Analitycal Hierarchy Process*. Jakarta: PAU EK UI
- Rahajeng, Anggie 2005. *Pemeringkatan Faktor Penentu Investasi Daerah*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Rizal, Jose & Teguh Prasetyo. 2002. *Analisis konflik majikan-buruh dalam kerangka game Theory: AHP*. Penelitian disajikan dalam simposium AHP II, INSAHP Surabaya, 9 November
- Saaty, Thomas. 1990. *Decision Making for Leaders*. Pittsburgh: Unversity of Pittsburgh

- Salvatore, Dominick. *Ekonomi Internasional*. Terjemahan oleh Haris Munandar. 1997. Jakarta: Erlangga.
- Sekilas World Trade Organization*. 2003. Jakarta: Direktorat Perdagangan Dan Perindustrian Multilateral
- Endang Sih Prapti, 2003. *Ekonomi Internasional. Kumpulan Bahan Kuliah*. Yogyakarta.
- Soelistyo. 1989. *Ekonomi Internasional Teori Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Liberty.